

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2002 - 2006**



**KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2002**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring tahun 2002 – 2006, guna memenuhi surat Bupati Lamongan tanggal 17 Desember 2002 Nomor : 065 / 640 / 413.031/2002 perihal penyampaian bahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati.

Penyusunan buku Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring ini sudah barang tentu masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu dilakukan pendalaman yang lebih teliti dan cermat dalam mengkaji dinamika organisasi saat ini dan perkembangan yang diharapkan pada masa mendatang.

Kepada para Kepala Dinas / Instansi dan semua pihak yang telah membantu penyusunan buku Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring ini, tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Dengan telah tersusunnya buku Rencana Startegis Kecamatan Kedungpring ini, kiranya dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Semoga bermanfaat.

Kedungpring, Januari 2003



KABUPATEN KEDUNGPRING

Des. RUSLAN, MM

Penata Tingkat I

NIP. 010073973

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. DAFTAR TABEL	iii
4. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Kedudukan dan Fungsi	2
1. Kedudukan	2
2. Fungsi	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Landasan Penyusunan	3
E. Sistematika	5
5. BAB II VISI, MISI, NILAI – NILAI, ANALISIS, ASUMSI DAN FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	6
A. Visi	6
B. Misi	7
C. Nilai – nilai	7
D. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	9
1. Analisis lingkungan internal	12
2. Analisa lingkungan eksternal	15
E. Asumsi	20
F. Hasil analisis	21
1. Strategi SO	23
2. Strategi WO	23
3. Strategi ST	24
4. Strategi WT	24
G. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan	25
6. BAB III TUJUAN DAN SASARAN	29
A. Tujuan	29
B. Sasaran	29
7. BAB IV CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	31
A. Kebijakan	31
B. Program	32
8. BAB V PENERAPAN RENCANA STRATEGI	35
9. BAB VI PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Faktor – faktor internal	10
Tabel 2 Matrik Faktor – faktor eksternal	11
Tabel 3 Matrik Analisis Swot	22
Tabel 4 Matrik Penentuan faktor – faktor kunci Keberhasilan	26 – 27
Tabel 5 Matrik Perencanaan Startegik -- 1	36 - 41
Tabel 5 Matrik Perencanaan Strategik – 2	42 - 65

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance, perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis dimaksud merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa *perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.*

Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Kedungpring sebagai organisasi perangkat daerah yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah serta tugasnya membantu Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 tahun 2001 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, maka sebagai konsekwensi logis disusunlah rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kedungpring tahun 2002 – 2006.

Perencanaan strategic (strategic planning) Kecamatan Kedungpring disusun dengan mengacu serta berpedoman kepada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 – 2005, Program Pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2001-2005, dan rencana strategis Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002-2006 sedangkan teknis penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring dilakukan dengan menerapkan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala (threats) yang ada.

B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI.

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Renstra Kecamatan Kedungpring tahun 2002 – 2006 merupakan dokumen perencanaan strategis kecamatan sebagai tindak lanjut dari Poldas dan Propeda serta Renstra Kabupaten Lamongan.

2. FUNGSI.

Renstra Kecamatan Kedungpring tahun 2002 – 2006 berfungsi sebagai penajaman Propeda Kabupaten Lamongan tahun 2001 – 2005 dan sebagai pendukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah yang sekaligus merupakan gambaran kinerja Kepala Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD.

Renstra Kecamatan Kedungpring tahun 2002 – 2006 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance”.

2. TUJUAN

Perencanaan strategis bertujuan sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam sistem akuntabilitas.

D. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kedungpring tahun 2002 – 2006 adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang – undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional :

- Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1999, tentang Garis – garis Besar Haluan Negara ;
- Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang – undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- Undang – undang Nomor 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 tahun 2001, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2001 – 2005 ;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2001 – 2005 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 tahun 2001, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 – 2005 ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 – 2005 ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 tahun 2002, tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 – 2006.

E. SISTIMATIKA

Untuk memudahkan dalam pemahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungpring tahun 2002 – 2006, disusun sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan, yang berisi Tinjauan secara umum, Kedudukan dan Fungsi, Maksud dan Tujuan, Landasan Penyusunan, dan Sistimatika Penyusunan.
- BAB II** : Berisi Visi, Misi, Nilai – nilai, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Asumsi – asumsi dan Hasil Analisis serta Faktor – faktor Keberhasilan, yang menjelaskan berbagai faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan.
- BAB III** : Berisi Tujuan dan Sasaran, di mana tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sedangkan sasaran menjabarkan tujuan.
- BAB IV** : Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran, yang berisi mengenai kebijaksanaan dan program Kecamatan Kedungpring.
- BAB V** : Penerapan Perencanaan Strategis.
- BAB VI** : Penutup

BAB II

VISI, MISI, NILAI – NILAI, ANALISIS, ASUMSI DAN FAKTOR FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. VISI

Pengertian *Visi* secara harfiah adalah cita – cita atau obsesi, ditinjau dari Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999, maka visi adalah *Cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.*

Visi Kecamatan Kedungpring adalah cita – cita yang menggambarkan akan di bawa kemana Kecamatan Kedungpring di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, masalah, tantangan dan hambatan masyarakat.

Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut maka ditetapkan visi Kecamatan Kedungpring sebagai berikut : *“Dengan pelayanan prima, mewujudkan peningkatan perekonomian rakyat dan sumber daya manusia yang berkualitas “*

Dengan visi dimaksud dikandung harapan pelayanan masyarakat di Kecamatan Kedungpring oleh setiap tingkatan organisasi / instansi dilaksanakan secara prima dalam rangka menuju terwujudnya peningkatan perekonomian rakyat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. MISI

Misi, sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak – pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan program – programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Kecamatan Kedungpring sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan melekat (waskat) dan pembinaan di semua tingkatan organisasi pelayanan masyarakat ;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang berorientasi agrobis dan berwawasan lingkungan ;
3. Pemberdayaan seluruh lembaga ekonomi rakyat utamanya pengusaha kecil dan koperasi ;
4. Peningkatan sumber daya manusia melalui program sukses wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan pendidikan masyarakat ;
5. Terciptanya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. NILAI – NILAI

Nilai – nilai merupakan ukuran tentang kebenaran dan kebaikan yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan individu maupun dalam organisasi.

Nilai – nilai yang diterapkan sebagai budaya organisasi Kecamatan Kedungpring sebagai berikut :

- > Kesetiaan : dimaksudkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945 dan Pemerintah ;
- > Kejujuran : dimaksudkan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang ;
- > Disiplin pribadi : dimaksudkan adalah kemampuan untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan norma – norma sosial yang ada di masyarakat ;
- > Kerja Sama : dimaksudkan adalah kemampuan untuk bekerja bersama – sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan ;
- > Demokrasi : dimaksudkan adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat serta mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat ;
- > Kepemimpinan : dimaksudkan adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas ;
- > Prakarsa : dimaksudkan adalah kemampuan dalam mengambil keputusan, langkah- langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan ;

- > **Pengetahuan** : dimaksudkan adalah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan tugas ;
- > **Kualitas (mutu)** : dimaksudkan adalah kemampuan untuk menunjukkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien ;
- > **Kesejahteraan** : dimaksudkan adalah kemampuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup baik lahir maupun batin.

D. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Merupakan langkah awal pra analisis, disusun pendataan dan pengidentifikasian faktor – faktor strategis internal yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta faktor – faktor strategis eksternal yang menggambarkan peluang dan ancaman organisasi, sebagaimana tabel 1 dan tabel 2.

TABEL : 1

FAKTOR – FAKTOR INTERNAL

FAKTOR – FAKTOR INTERNAL	BOBOT	RATING	B X R	SCORE
<u>KEKUATAN (STRENGTH) :</u>				
1. Adanya lembaga / organisasi struktural .	0,15	4	0,60	1
2. Adanya jumlah pegawai yang memadai.	0,05	2	0,10	4
3. Adanya mekanisme tata kerja yang baku.	0,15	4	0,60	2
4. Tersedianya dana yang memadai.	0,10	3	0,30	3
<u>KELEMAHAN (WEAKNESS) :</u>				
1. Terbatasnya personil yang profesional.	0,20	4	0,80	1
2. Lemahnya fungsi Waskat.	0,15	3	0,45	2
3. Terbatasnya sarana / prasarana	0,15	2	0,30	3
4. Rendahnya disiplin dan etos kerja	0,05	2	0,10	4
TOTAL	1,00	24	3,35	-

TABEL : 2
FAKTOR – FAKTOR EKSTERNAL

FAKTOR – FAKTOR ENSTERNAL	BOBOT	RATING	B X R	SCORE
<u>PELUANG (OPPORTUNITIES) :</u>				
1. Adanya SDA yang belum dikembangkan.	0,20	4	0,80	1
2. Jumlah penduduk yang banyak.	0,10	2	0,20	3
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berkembang	0,10	3	0,30	2
4. Terbukanya informasi yang mengglobal	0,10	2	0,20	4
<u>ANCAMAN (TREATS) :</u>				
1. Berkurangnya lahan produktif	0,20	1	0,20	3
2. Sulitnya alih teknologi pertanian	0,15	2	0,30	1
3. Menurunnya swadaya masyarakat.	0,10	3	0,30	2
4. Berkurangnya kepercayaan masyarakat	0,05	4	0,20	4
TOTAL	1,00	21	2,50	-

1. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan Kecamatan Kedungpring memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasaran, hal ini bermakna sebagai kekuatan (strength).

Sedangkan situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Kecamatan Kedungpring gagal mencapai tujuannya, hal ini bermakna sebagai kelemahan (weakness).

Adapun yang menjadi kekuatan (strength) Kecamatan Kedungpring, meliputi :

a. Adanya lembaga / organisasi struktural ;

Berlakunya Undang – undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/ Kabupaten / Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 29 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, memberikan peluang bagi Kecamatan Kedungpring untuk mengembangkan wilayah sesuai dengan potensi yang ada. Hal tersebut didukung oleh unit satuan kerja teknis yang ada di wilayah Kecamatan, dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

➤ Cabang Dinas Teknis	: 4 Lembaga
➤ Unit Pelaksana Teknis	: 5 Lembaga
➤ Lembaga lainnya	: 6 Lembaga

b. Adanya Jumlah Pegawai Yang Memadai ;

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Kedungpring, dapat dirinci sebagai berikut :

> Golongan I sebanyak	: 17 Orang
> Golongan II sebanyak	: 81 Orang
> Golongan III sebanyak	: 296 Orang
> Golongan IV sebanyak	: 30 Orang

Jumlah	: 424 Orang
--------	-------------

c. Adanya Mekanisme dan Tata Kerja yang baku

Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat mempertegas keberadaan Camat sebagai pejabat sipil tertinggi di wilayah kerjanya, sehingga memberikan keleluasaan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 07 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, demikian juga dengan Unit kerja yang lain .

d. Tersedianya Dana yang Memadai

Guna kelancaran kegiatan operasional Kecamatan Kedungpring didukung dengan adanya dana operasional yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang jumlahnya memadai. Disamping itu juga didukung dana operasional Unit kerja lainnya sesuai dengan anggaran masing – masing.

Sedangkan yang menjadi kelemahan (weakness) Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya Personil yang Profesional ;

Dari jumlah pegawai di wilayah Kecamatan Kedungpring sebanyak 424 orang, secara jujur diakui bahwa tenaga / personal yang profesional sangat terbatas, sehingga belum mampu memberikan dukungan kepada pejabat pengambil keputusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Lemahnya fungsi Pengawasan Melekat ;

Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan melekat oleh masing – masing pimpinan unit kerja berakibat masih terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas, sehingga tujuan organisasi terhambat dan bahkan tidak tercapai.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana ;

Pada setiap unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan Kedungpring, meskipun telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana, namun kenyataannya dirasa masih sangat terbatas, sehingga belum mampu didayagunakan secara maksimal.

d. Rendahnya Disiplin dan Etos Kerja ;

Salah satu faktor pendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima adalah dimilikinya sikap disiplin dan etos kerja yang tinggi dari para aparatur pemerintah sebagai pelayan / abdi masyarakat. Kenyataannya kondisi para aparatur pemerintah Kecamatan Kedungpring belum sebagaimana yang diharapkan, dengan kata lain disiplin disiplin dan etos kerjanya masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Faktor – faktor eksternal yang bersifat positif, yang membantu Kecamatan Kedungpring untuk mencapai atau mampu melampaui pencapaian sasarannya, hal ini bermakna sebagai peluang (opportunities).

Sedangkan faktor – faktor eksternal yang bersifat negatif, yang dapat menyebabkan organisasi gagal dalam mencapai sasarannya, hal ini bermakna sebagai ancaman (threats).

Adapun yang menjadi peluang (opportunities) dari Kecamatan Kedungpring, adalah meliputi :

a. Adanya Sumber Daya Alam yang belum dikembangkan.

Kondisi wilayah Kecamatan Kedungpring masih memungkinkan untuk dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, karena masih adanya ketersediaan sumber daya alam yang cukup, misalnya di sektor pertanian dan kehutanan yakni sub sektor pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Pengembangan di sektor ini diarahkan untuk dilakukan intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang berorientasi agrobis dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan data yang ada lahan pertanian teknis dan setengah teknis tercatat seluas 3.362,50 hektar, dan lahan sawah non PU dengan pengairan setengah teknis dan pengairan sederhana tercatat seluas 126,67 hektar. Lahan-lahan tersebut belum dibudidayakan secara maksimal, demikian juga dengan potensi waduk-waduk yang ada, baik waduk yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, maupun waduk-waduk yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.

b. Jumlah penduduk yang mendukung ;

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi bagi suatu daerah akan berakibat timbulnya masalah dibidang sosial, ekonomi dan lain-lain.

Di Wilayah Kecamatan Kedungpring hal tersebut tidak terjadi karena tingkat pertumbuhan penduduk sangat rendah dan cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari angka rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun 1997 sampai dengan 2001 sebagai berikut :

- Tahun 1997 – 1998 rata-rata pertumbuhan penduduk 0,14 %
- Tahun 1998 – 1999 rata-rata pertumbuhan penduduk 0,29 %
- Tahun 1999 – 2000 rata-rata pertumbuhan penduduk – 0,09 %
- Tahun 2000 – 2001 rata-rata pertumbuhan penduduk – 0,13 %

Sementara itu jumlah penduduk keadaan sampai dengan akhir 2002 adalah sebesar 53.102 jiwa yang terdiri atas 25.974 jiwa laki-laki dan 27.128 jiwa perempuan, jumlah penduduk terpadat adalah Desa Dradahblumbang 3.965 jiwa dan terendah adalah Desa Sidobangun 414 jiwa.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kedungpring jumlah penduduknya merupakan peluang untuk ditingkatkan Sumber Daya Manusianya sebagai pelaku-pelaku pembangunan dimasa mendatang.

c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang berkembang ;

Dalam perkembangannya kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungpring dari tahun ke tahun menunjukan adanya peningkatan .

Salah satu faktor pendukungnya adalah meningkatnya perekonomian masyarakat yang bertumpu pada hasil produksi pertanian, perdagangan dan jasa serta industri kecil/ rumah tangga. Fasilitas atau sarana perekonomian yang ada meliputi 5 (lima) buah pasar desa, 2 (dua) buah pasar hewan (kambing), 462 toko, kios / warung, 7 (tujuh) buah lembaga perkreditan rakyat yang terdiri 2 (dua) Bank Pemerintah (BRI) serta 5 (lima) buah Bank Perkreditan Rakyat, dan lembaga Koperasi antara lain KUD, KOPTI, KOPTAN.

Potensi lainnya yang dapat dikembangkan adalah adanya industri kecil yang meliputi perusahaan huller / penggilingan padi, oven tembakau / omprongan dan kerajinan rumah tangga berupa anyaman pandan dan bambu.

d. Terbukanya informasi yang mengglobal ;

Terbukanya akses informasi baik ekonomi, sosial, budaya dan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk didayagunakan secara maksimal. Dengan demikian diharapkan akan segera membuka isolasi kultur budaya masyarakat desa-desa yang masih tertinggal dari desa-desa lainnya, agar mampu dan berdaya.

Sedangkan yang menjadi ancaman (threats) Kecamatan Kedungpring, adalah meliputi :

a. Berkurangnya lahan produktif ;

Hasil pendataan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun menunjukkan adanya penurunan lahan produktif di wilayah Kecamatan Kedungpring. Hal tersebut dapat dijelaskan sbb:

➤ Jumlah lahan produktif pada tahun 1997

- Sawah PU seluas : 3.370,12 hektar
- Sawah non PU seluas : 128,88 hektar

➤ Jumlah lahan produktif pada tahun 1999

- Sawah PU seluas : 3.362,50 hektar
- Sawah non PU seluas : 126,67 hektar

Penurunan lahan produktif :

- Sawah PU seluas : 7,62 hektar
- Sawah non PU seluas : 2,38 hektar

Perubahan tataguna tanah tersebut antar lain dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk perumahan/ pemukiman dan tempat usaha.

b. Sulitnya alih teknologi pertanian ;

Hasil pendataan di lapangan tentang produksi pertanian Kecamatan Kedungpring tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- Produktifitas padi 380.621 kuintal dari lahan luas panen seluas 6.620 hektar, rata-rata produksi 57,56 kuintal per hektar.
- Produktifitas jagung 67.439 kuintal dari lahan luas panen seluas 2.027 hektar, rata-rata produksi 33, 27 kuintal per hektar.
- Produktifitas kacang hijau 3.812, 40 kuintal dari lahan luas panen 340 hektar, rata-rata produksi 10, 59 kuintal per hektar.
- Produktifitas kedelai 15.404,40 kuintal dari lahan luas panen 1.261 hektar, rata-rata produksi 12,22 kuintal per hektar.
- Produktifitas ubi jalar 3.450 kuintal dari lahan luas panen 30 hektar (hanya satu desa), rata-rata produksi 115 kuintal per hektar.

- Produktifitas tembakau 105.610 kuintal dari lahan luas panen 2.007 hektar, rata-rata produksi 52,62 kuintal per hektar.

Berangkat dari hasil pendataan produksi pertanian tersebut dapat disimpulkan bahwa produktifitas pertanian di Kecamatan Kedungpring belum maksimal dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Masalahnya adalah adanya indikator masih sulitnya pelaksanaan alih teknologi pertanian yang disebabkan karena beberapa hal antar lain :

- Perilaku petani masih terdisional, sumber daya manusia yang rendah ;
- Peran Kelompok Tani belum maksimal karena masih memiliki sifat ketergantungan yang tinggi/ belum mandiri ;
- Generasi muda yang diharapkan cenderung mencari kerja ke kota (urbanisasi) ;
- Kurangnya permodalan, biaya operasional tinggi dan harga pupuk/ pestisida lebih mahal dari pada harga gabah ;
- Kondisi lahan semakin menurun tingkat kesuburannya akibat penggunaan pupuk kimia/ buatan

c. Menurunnya swadaya masyarakat ;

Berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di bidang teknologi komunikasi, memberikan kesempatan terbukanya akses informasi. Salah satu dampaknya adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya masyarakat. Pada masa transisi tersebut nilai kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat cenderung menurun, dan mengarah mengemukakan nilai-nilai individualitis.

Kaitan dengan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat, sehingga berpengaruh pula pada tingkat kesadaran berswadaya dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan.

d. Berkurangnya kepercayaan masyarakat ;

Gejolak sosial yang terjadi pada era reformasi sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tidak hanya di tingkat perkotaan namun sudah merambah sampai di pedesaan, yang antara lain adanya gejala berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah. Keberanian mengemukakan pendapat, menyampaikan kritik oleh sekelompok masyarakat, meski ada kesan kebablasan adalah merupakan dinamika demokrasi yang mesti diperhatikan.

E. ASUMSI

Asumsi atau assumptions, adalah merupakan kesimpulan / conclusions tentang faktor – faktor lingkungan serta dampak atau pengaruhnya terhadap kinerja masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pula pada hubungan internal organisasi. Dalam kaitan dengan penyusunan perencanaan strategis, asumsi dapat disebut sebagai “ asumsi organisasi”.

Adapun asumsi – asumsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (strength) ;
 - a. Adanya lembaga / organisasi struktural ;
 - b. Adanya jumlah pegawai yang memadai ;
 - c. Adanya mekanisme dan tata kerja yang baku ;

d. Tersedianya dana yang memadai ;

2. Kelemahan (weakness) ;

- a. Terbatasnya personil yang profesional ;
- b. Lemahnya fungsi pengawasan melekat ;
- c. Terbatasnya sarana / prasarana ;
- d. Rendahnya disiplin dan etos kerja.

3. Peluang (opportunity) ;

- a. Adanya sumber daya alam yang belum dikembangkan ;
- b. Jumlah penduduk yang mendukung ;
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berkembang ;
- d. Terbukanya informasi yang mengglobal.

4. Ancaman (threat) ;

- a. Berkurangnya lahan produktif ;
- b. Sulitnya alih teknologi pertanian ;
- c. Menurunnya swadaya masyarakat ;
- d. Berkurangnya kepercayaan masyarakat.

F. HASIL ANALISIS

Dengan memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Kedungpring sebagai organisasi perangkat daerah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Lamongan, maka ditetapkan beberapa strategi organisasi. Untuk itu dijelaskan pada tabel 3 berikut :

Tabel 3
ANALISIS SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL	KEKUATAN (S) 1. Adanya lembaga / organisasi struktural ; 2. Adanya mekanisme / tata kerja yang baku ; 3. Tersedianya dana yang memadai ; 4. Adanya jumlah pegawai yang memadai.	KELEMAHAN (W) 1. Terbatasnya personil yang profesional ; 2. Lemahnya fungsi pengawasan melekat ; 3. Terbatasnya sarana / prasarana ; 4. Rendahnya disiplin dan etos kerja.
PELUANG (O) 1. Adanya SDA yang belum dikembangkan ; 2. Kondisi Sosial ckonomi masyarakat yang berkembang ; 3. Jumlah penduduk yang memadai ; 4. Terbukanya informasi yang menggloabal.	STRATEGI SO 1. Mengoptimalkan peran lembaga / organisasi struktural yang ada untuk mengembangkan SDA ; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme/ tata kerja dengan memanfaatkan kondisi sosek masyarakat yang berkembang ; 3. Mendayagunakan dana yang ada untuk memanfaatkan jumlah penduduk yang mendukung ; 4. Mendayagunakan jumlah pegawai yang ada untuk memanfaatkan terbukanya informasi yang menggloabal.	STRATEGI WO 1. Meningkatkan jumlah personil yang profesional untuk mengembangkan SDA ; 2. Meningkatkan fungsi Waskat untuk mendorong kondisi sosek masyarakat yang berkembang ; 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menggerakan jumlah penduduk yang mendukung ; 4. Meningkatkan disiplin dan etos kerja guna memanfaatkan terbukanya informasi yang menggloabal.
ANCAMAN (T) 1. Sulitnya alih teknologi pertanian ; 2. Menurunnya swadaya masyarakat ; 3. Berkurangnya lahan produktif ; 4. Berkuarngnya kepercayaan masyarakat.	STRATEGI ST 1. Mengoptimalkan peran lembaga/ organisasi struktural untuk mengatasi sulitnya alih teknologi pertanian ; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme/ tata kerja untuk mengatasi menurunnya swadaya masyarakat ; 3. Mendayagunakan dana yang ada untuk mencegah berkurangnya lahan produktif ; 4. Mendayagunakan jumlah pegawai yang ada untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan masyarakat.	STRATEGI WT 1. Meningkatkan jumlah personil yang profesional untuk mengatasi sulitnya alih teknologi pertanian ; 2. Meningkatkan fungsi waskat untuk mengantisipasi menurunnya swadaya masyarakat ; 3. Memanfaatkan sarana/prasarana yang ada guna mencegah berkuarangnya lahan produktif ; 4. Meningkatkan disiplin dan etos kerja guna mengatasi berkurangnya kepercayaan masyarakat

Hasil analisis yang merupakan interaksi faktor – faktor lingkungan internal dengan faktor – faktor lingkungan eksternal adalah berupa strategi organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi SO

Adalah strategi menggunakan / mobilisasi kekuatan yang tersedia untuk memanfaatkan peluang yang ada, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan peran lembaga / organisasi struktural untuk mengembangkan sumber daya alam;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme / tata kerja dengan memanfaatkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat ;
- c. Mendayagunakan dana yang tersedia untuk memanfaatkan dukungan jumlah penduduk ;
- d. Mendayagunakan pegawai untuk memanfaatkan terbukanya informasi yang mengglobal.

2. Strategi WO

Adalah strategi untuk menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan hasil sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesional personil untuk mengembangkan sumber daya alam ;
- b. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat untuk mendorong berkembangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat ;
- c. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menggerakkan dukungan penduduk ;
- d. Meningkatkan disiplin dan etos kerja guna memanfaatkan terbukanya informasi yang mengglobal ;

3. Strategi ST

Adalah strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada, atau mengubahnya menjadi peluang, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan peran lembaga / organisasi struktural guna mengatasi sulitnya alih teknologi pertanian ;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme tata kerja organisasi guna mengatasi menurunnya swadaya masyarakat ;
- c. Mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencegah berkurangnya lahan produktif ;
- d. Mendayagunakan pegawai guna mengatasi berkurangnya kepercayaan masyarakat.

4. Strategi WT

Adalah strategi yang memadukan antara kelemahan dan tantangan untuk memperkecil kelemahan yang ada dan sedapat mungkin menghindari tantangan yang ada, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme personil untuk mengatasi sulitnya alih teknologi pertanian ;
- b. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat untuk mengantisipasi menurunnya swadaya masyarakat ;
- c. Memanfaatkan sarana / prasarana guna mencegah berkurangnya lahan produktif ;
- d. Meningkatkan disiplin dan etos kerja guna mengatasi berkurangnya kepercayaan masyarakat.

G. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor – faktor kunci keberhasilan merupakan topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan misi, dalam hal mana kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kedungpring menerima sukses atau kegagalan dari suatu misi organisasi. Faktor – faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategik yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan.

Faktor – faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi pembangunan Kecamatan Kedungpring dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor – faktor kunci tersebut antara lain berupa : potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana dan prasarana, serta peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang digunakan oleh Kecamatan Kedungpring dalam kegiatan – kegiatannya. Untuk mengetahui penentuan faktor – faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4
PENENTUAN FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN																	FPK	
	VISI	M I S I					NIL AI												
		M.1	M.2	M.3	M.4	M.5	N.1.	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	N.8	N.9	N.10	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
STRATEGI SO																			
1. Mengoptimalkan peran lembaga/ organisasi struktural untuk mengembangkan SDA ;	3	4	4	3	4	3	1	1	1	3	2	4	2	3	3	4	45	IV	
2. Mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme/ tata kerja dengan memanfaatkan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat ;	3	4	3	4	3	3	1	1	1	2	2	3	3	3	4	3	43		
3. Mendayagunakan dana yang tersedia untuk memanfaatkan dukungan jumlah penduduk ;	2	4	2	3	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	2	2	39		
4. Mendayagunakan pegawai untuk memanfaatkan terbukanya informasi yang mengglobal.	3	4	2	2	3	2	4	4	4	2	1	3	3	3	3	1	44		
STRATEGI ST																			
1. Mengoptimalkan peran lembaga / organisasi struktural untuk mengatasi sulitnya alih teknologi pertanian ;	3	2	4	3	3	2	1	1	1	2	1	3	3	3	3	3	38	II	
2. Mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme tata kerja untuk mengatasi menurunnya swadaya masyarakat ;	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	2	30		
3. Mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencegah berkurangnya lahan produktif ;	2	2	4	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	3	1	3	30		
4. Mendayagunakan pegawai untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan masyarakat.	4	4	2	2	3	3	4	3	4	3	2	3	3	4	3	2	49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
STRATEGI WO																		
1. Mengoptimalkan profesionalisme personil untuk mengembangkan SDA ;	4	3	4	3	3	1	4	4	4	3	2	4	3	4	4	3	53	I
2. Mengoptimalkan fungsi waskat untuk mendorong perkembangan sosek masyarakat ;	4	3	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	35	
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menggerakkan dukungan jumlah penduduk ;	2	2	3	3	3	2	1	1	1	1	3	2	3	2	3	4	36	
4. Meningkatkan disiplin dan etos kerja guna memanfaatkan terbukanya informasi yang mengglobal.	4	4	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	4	2	45	III
STRATEGI WT																		
1. Meningkatkan profesionalisme personil guna mengatasi sulitnya alih teknologi pertanian ;	3	2	4	3	3	1	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	42	
2. Meningkatkan fungsi pengawasan melekat guna mengatasi menurunnya swadaya masyarakat ;	3	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	2	3	2	36	
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia guna mencegah berkurangnya lahan produktif ;	2	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	31	
4. Meningkatkan disiplin dan etos kerja guna mengatasi berkurangnya kepercayaan masyarakat.	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3	2	40	

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana digambarkan pada tabel 4 di atas maka dapat ditetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme personil untuk mengembangkan sumber daya alam ;
2. Mendayagunakan pegawai guna mengatasi menurunnya kepercayaan masyarakat ;
3. Meningkatkan disiplin dan etos kerja guna memanfaatkan terbukanya informasi yang mengglobal ;
4. Mengoptimalkan peran lembaga / organisasi untuk pengembangan sumber daya alam.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas, untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan misi organisasi.

Penetapan tujuan tersebut didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Kecamatan Kedungpring mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

Tujuan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah ;
2. Meningkatkan pengembangan sumber daya alam dengan memanfaatkan globalisasi informasi ;
3. Meningkatkan peran institusi Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima ;
4. Meningkatkan pembentukan opini dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. SASARAN

Upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan disebut sebagai sasaran. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik pemerintah. Adapun sasaran dalam perencanaan strategik Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah ;

2. Terlaksananya peraturan perundang – undangan ;
3. Terwujudnya pelayanan prima pada setiap tingkatan ;
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan yang demokratis ;
5. Terwujudnya instistusi pemerintah yang bersih dan baik ;
6. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ;
7. Berkembangnya potensi sumber daya alam.

BAB IV

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran, merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya Kecamatan Kedungpring yang meliputi penetapan kebijaksanaan dan program.

A. KEBIJAKSANAAN

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijaksanaan Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui upaya peningkatan profesionalisme, disiplin dan etos kerja ;
2. Pelaksanaan penerapan peraturan perundang – undangan dengan meningkatkan pengawasan melekat ;
3. Mewujudkan pelayanan prima pada setiap tingkatan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan ;
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang demokratis melalui pemberdayaan aparatur pemerintah desa, lembaga – lembaga desa dan masyarakat ;
5. Mewujudkan institusi pemerintahan yang bersih dan baik dengan memantapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program ;

6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memperhatikan aspirasi serta melibatkan peran masyarakat pada kegiatan pembangunan ;
7. Mengembangkan potensi sumber daya alam sektor pertanian dan kehutanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program Kecamatan Kedungpring adalah :

1. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, melalui program :
 - a. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah ;
 - b. Pembinaan Kepegawaian ;
 - c. Pembinaan mental beragama ;
2. Pelaksanaan penerapan peraturan perundang – undangan, melalui program :
 - a. Sosialisasi undang – undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 - b. Peningkatan pengawasan melekat.
3. Mewujudkan pelayanan prima pada semua tingkatan, melalui program :
 - a. Penyederhanaan prosedur pelayanan ;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang – undangan ;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana.

4. Mengembangkan potensi sumber daya alam sektor pertanian dan kehutanan melalui penerapan Iptek, melalui program :
 - a. Penanganan pasca panen kedelai ;
 - b. Pengembangan hutan rakyat ;
 - c. Penguatan modal kelompok tani ;
 - d. Peningkatan mutu intensifikasi ;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia ;
 - f. Normalisasi saluran waduk Kalen ;
 - g. Normalisasi jaringan irigasi waduk Prijetan ;
 - h. Pembangunan perikanan dan peternakan rakyat terpadu ;
 - i. Pembangunan sumber daya, sarana dan prasarana perikanan dan peternakan;
 - j. Diversifikasi pangan dan gizi ;
 - k. Pengembangan usaha perikanan dan peternakan.
5. Mewujudkan institusi pemerintahan yang bersih dan baik, melalui program :
 - a. Peningkatan koordinasi lintas sektoral ;
 - b. Pemantapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi ;
 - c. Penataan personil sesuai dengan beban tugas.
6. Meningkatkan pemerintahan desa yang demokratis, melalui program :
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan Operasional pemerintahan desa ;
 - b. Pembinaan aparatus pemerintah desa dan BPD ;
 - c. Pemberdayaan LKD.

7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memperhatikan aspirasi serta melibatkan peran masyarakat pada pembangunan, melalui program :
- a. Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat ;
 - b. Pembinaan tradisi dan nilai – nilai budaya ;
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ;
 - d. Optimalisasi pelayanan UGD ;
 - e. Optimalisasi pelayanan KIA ;
 - f. Optimalisasi pelayanan rawat inap ;
 - g. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB V

PENERAPAN RENCANA STRATEGI

Guna memudahkan rencana strategi seperti diuraikan di atas, kemudian disiapkan suatu kerangka perencanaan strategis (PS) dalam bentuk matrik yang menguraikan secara ringkas keterkaitan antara kebijaksanaan dengan perencanaan strategis sebagai dasar tolok ukur kinerja Kecamatan Kedungpring.

Kerangka penjabaran ini dituangkan dalam formulir perencanaan strategik – 1 (PS 1) sampai dengan perencanaan strategik – 2 (PS 2). Perencanaan strategik –1 adalah perencanaan strategis Kecamatan Kedungpring tahun 2002 yang merupakan tahun ke 1 (pertama) dari perencanaan strategis 5 (lima) tahun yang direncanakan. Sedangkan perencanaan strategik – 2 adalah perencanaan strategis Kecamatan Kedungpring tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 yang merupakan tahun ke 2 (dua) , 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dari perencanaan strategis 5 (lima) tahun yang direncanakan, sebagaimana terlampir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4. Peningkatan SDM melalui program sukses Wajar Dikdas 9 tahun dan pelayanan pendidikan masyarakat. 5. Terciptanya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	2. Meningkatkan pengembangan SDA dengan memanfaatkan globalisasi informasi.	4. Berkembangnya potensi SDA.	1. Mengembangkan potensi SDA sektor pertanian dan kehutanan melalui penerapan iptek.	1. Penanganan pasca panen kedelai. 2. Pengembangan hutan rakyat. 3. Penguatan modal kelompok tani.	1. Pemantapan cara panen. 2. Pengembangan teknologi pengolahan industri tahu dan tempe. 1. Penguatan kebun rakyat. 1. Pembinaan ketahanan pangan (PKP) 3. Pembinaan pengembangan kelembagaan pangan di pedesaan (PKPP) 4. Pembinaan lumbung paceklik 1. Pengujian pupuk organik. 1. Pelatihan penyuluh 2. Penilaian angka kredit fungsional

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								6. Normalisasi saluran waduk Kalen	1. Penangkisan saluran.	
								7. Normalisasi jaringan irigasi waduk Prijetan.	1. Perbaikan bangunan air. 2. Perbaikan saluran sekunder.	
								8. Pembangunan perencanaan dan peternakan rakyat terpadu.	1. Penerapan teknologi tepat guna. 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit. 3. Pengawasan Kesmayit	
								9. Pembangunan Sumber daya, sarana dan prasarana peternakan dan peternakan.	1. Penataan Kantor Cabang Dinas di Kedungpring	
								10. Diversifikasi pangan dan Gizi.	1. Sosialisasi penerapan MI/HACCP pada pengolahan tradisional dan menengah.	
								11. Pengembangan usaha peternakan.	1. Budidaya air tawar. 2. Budidaya sapi potong 3. Budidaya unggas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Meningkatkan peran institusi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima	5. Terwujudnya pelayanan prima pada setiap tingkatatan.	1. Mewujudkan institusi pemerintah yang bersih dan baik dengan memanfaatkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program	1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral. 2. Penetapan pelaksanaan tupoksi organisasi 2. Penataan personil sesuai dengan beban tugas	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program 1. Pembinaan pegawai 1. Penataan staf secara bertahap.	
						5. Meningkatkan kinerja pemerintah yang bersih dan baik.	1. Meningkatkan Pemerintahan Desa yang demokratis.	1. Peningkatan Pendidikan dan latihan operasional pemerintahan desa. 2. Pembinaan aparatur pemerintah desa dan BPD 3. Pemberdayaan LKMD	1. Dilat aparat pemerintah desa dan BPD 1. Komprensi dinas aparat pemerintah desa dan pertemuan EPD secara rutin 1. Penyuluhan dan pembinaan secara terpadu.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4. Meningkatkan pembentukan opini dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.	7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memperhatikan aspirasi serta melibatkan peran masyarakat pada pembangunan.	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat 2. Pembinaan tradisi dan nilai - nilai budaya.	1. Penyelesaian Guru melalui DII dan S L 7. Diklat Guru melalui gugus sekolah. 1. Pengiriman per tukaran pemuda antar propinsi (PPAP) 2. Pendataan organisasi pemuda dan club olah raga dan kesecian 3. Motivating MOS 4. Pendataan anak putus sekolah 5. Pendataan kursus - kursus ketramplilan di luar sekolah. 6. Pengadaan sarana dan prasarana	1. Pelaksanaan gedung dan inibelair sekolah 2. Mengadakan rehabilitasi gedung. 3. Penyusunan buku pelajaran. 4. Pengadaan alat peraga.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								4.Optimalisasi pelayanan UGD.	1. Membuka pelayanan UGD 24 jam.	
								5.Optimalisasi pelayanan KIA.	1. Membuka pelayanan rawat inap 24 Jam	
								6. Optimalisasi pelayanan rawat inap.	1. Membuka pelayanan rawat inap 24 jam. 2. Mini lokakarya peningkatan kemampuan dan ketrampilan paramedis dan bidan.	
								7. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	1. Operasional Tramtib secara terpadu. 2. Penegakan peraturan daerah 3. Penertiban ijin usaha 4. Penguatulan bencana alam dan penguat	

TABEL 5

RENCANA STRATEGIK – 2

Instansi : Kecamatan Kedungpring

Tahun : 2003

FORMULIR PS – 2

NO	BIDANG / SEKTOR/ SUB SEKTOR	KEBIJAKSANAAN STRATEGIK NASIONAL	RENCANA STRATEGIK KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN 2003 (TAHUN KE 2 DARI V TAHUN)							KET.
			VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN/ SASARAN			
							KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Bid. Hukum 2.Bid. ekonomi 3.Bid. Politik 4.Bid. Agama 5.Bid. Pendidikan 6.Bid. Sosbud 7.Bid. Pemb. daerah 8.Bid. SDA & Ling. Hidup. 9. Bid. Iptek 10.Bid. Keamanan dan ketertiban	1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan 2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik 3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. 4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya 5. Meningkatkan pembangunan daerah.	Dengan pelayanan prima, mewujudkan peningkatan perekonomian rakyat dan sumber daya manusia yang berkualitas.	1. Peningkatan Wadkat dan pembinaan di semua tingkatan pelayanan masyarakat. 2. Peningkatan kesejahteraan melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan. 3. Pemberdayaan seluruh lembaga ekonomi rakyat utamanya koperasi dan pengusaha kecil.	1. Meningkatkan profesionalisme, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah.	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah. 2. Terlaksananya peraturan perundang – undangan . 3. Terwujudnya institusi pemerintah yang bersih dan baik.	1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui upaya peningkatan profesionalisme, disiplin dan etos kerja. 1. Pelaksanaan penerapan peraturan perundang – undangan dengan meningkatkan pengawasan melekat. 1. Mewujudkan pelayanan prima pada setiap tingkatan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan.	1. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah. 2. Pembinaan kepegawalan 3. Pembinaan mental beragama 1. Sosialisasi Undang – undang nomor 22 tahun 1999 2. Peningkatan pengawasan melekat. 1. Sosialisasi peraturan perundang – undangan. 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan 3. Peningkatan sarana dan prasarana	1. Diklat Aparatur. 1. Peningkatan disiplin pegawai. 1. Pembinaan mental beragama Islam. 1. Pemantapan otoda. 1. Peningkatan sistem pengawasan 1. Penyuluhan. 1. Visualisasi tata cara pelayanan 1. Pengadaan sarana dan prasarana.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Peningkatan SDM melalui program sukses Wajar Dikdas 9 tahun dan pelayanan pendidikan masyarakat 5. Terciptanya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	2. Meningkatkan pengetahuan SDA dengan memanfaatkan globalisasi informasi	4. Berkembangnya potensi SDA	1. Mengembangkan potensi SDA sektor pertanian dan kehutanan melalui penerapan iptek.	1. Penanganan pasca panen kedelai 2. Pengumpulan hutan rakyat 3. Penguatan modal kelompok tani	1. Penetapan cara panen. 2. Pengembangan teknologi pengolahan industri tahu dan tempe. 1. Penghijauan kebun rakyat 1. Pembinaan ketahanan pangan (PKP) 3. Pembinaan pengembangan kelembagaan pangan di pedesaan (PKPP) 4. Pembinaan humberg pacelak 1. Pengujian pupuk organik 1. Pelatihan penyuluh 2. Pelatihan angka kredit kelompok fungsional	
								4. Peningkatan mutu intensifikasi 5. Pengembangan sumber daya manusia		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								6. Normalisasi sahur primer prijetan kiri	1. Pasangan sahur	
								7. Normalisasi pembuangan waduk Prijetan.	1. Penatokan kali 2. Penggalian dan penangkisan	
								8. Pembangunan n perikanan dan peternakan rakyat terpadu.	1. Penerapan teknologi tepat guna. 2. Penggalian dan pemberantasan penyakit. 3. Pengawasan Kernayit	
								9. Pembangunan n Sumber daya, sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.	1. Penataan Kantor Cabang Dinas di Kedungpring	
								10. Diversifikasi pangan dan gizi.	1. Sosialisasi penerapan M/HACCP pada pengolahan tradisional dan menengah	
								11. Pengembangan an usaha perikanan dan peternakan.	1. Budaya air tawar. 2. Budaya sapi potong 3. Budaya ungas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Meningkatkan peran institusi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima	5. Terwujudnya pelayanan prima pada setiap tingkatan.	1. Mewujudkan institusi pemerintah yang bersih dan baik dengan memantapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program	1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral. 2. Pemantapan pelaksanaan tupoksi organisasi 2. Penataan personil sesuai dengan beban tugas	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program 1. Pembinaan pegawai 1. Penataan staf secara bertahap.	
						5. Meningkatnya kinerja pemerintah yang bersih dan baik.	1. Meningkatkan Pemerintahan Desa yang demokratis.	1. Peningkatan Pendidikan dan latihan operasional pemerintahan desa. 2. Pembinaan aparatur pemerintah desa dan BPD 3. Pemberdayaan LKD	1. Diklat aparat pemerintah desa dan BPD 1. Kompreksi dinas aparat pemerintah desa dan pertemuan BPD secara rutin 1. Penyuluhan dan pembinaan secara terpadu.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4. Meningkatkan pembentukan opini dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.	7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memperhatikan aspirasi serta melibatkan peran masyarakat pada pembangunan.	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat. 2. Pembinaan tradisi dan nilai - nilai budaya.	1. Penyelesaian Guru melalui DII dan S.I. 7. Diklat Guru melalui gugus sekolah. 1. Pengiriman pertukaran pemuda antar propinsi (PPAP) 2. Pendataan organisasi pemuda dan club olah raga dan kesenian 3. Monitoring MOS 4. Pendataan anak putus sekolah 5. Pendataan kursus - kursus ketrampilan di luar sekolah. 1. Pendataan gedung dan mebelair sekolah. 2. Mengusulkan rehabilitasi gedung. 3. Penyusunan buku pelajaran. 4. Pengadaan alat persga.	
								6. Pengadaan sarana dan prasarana		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								4. Optimalisasi pelayanan UGD.	1. Membuka pelayanan UGD 24 jam.	
								5. Optimalisasi pelayanan KIA.	1. Membuka pelayanan rawat inap 24 jam	
								6. Optimalisasi pelayanan rawat inap.	1. Membuka pelayanan rawat inap 24 jam. 2. Minil ekakarya peningkatan kemampuan dan ketrampilan paramedis dan bidan.	
								7. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	1. Operasional Transtib secara terpadu. 2. Penegakan peraturan daerah 3. Penertiban ljin usaha 4. Penanggulangan an bencana alam dan pengungsi	

TABEL 5

RENCANA STRATEGIK - 2

Instansi : Kecamatan Kedungpring

Tahun : 2004

FORMULIR PS - 2

RENCANA STRATEGIK KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN 2004 (TAHUN KE 3 DARI V TAHUN)										
NO	BIDANG / SEKTOR/ SUB SEKTOR	KEBIJAKSANAAN STRATEGIK NASIONAL	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN		KEI	
							KEBIJAKSANAAN	PROGRAM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Bid. Hukum 2. Bid. ekonomi 3. Bid. Politik 4. Bid. Agama 5. Bid. Pendidikan 6. Bid. Sosbud 7. Bid. Pemb. daerah 8. Bid. SDA & Ling. Hidup 9. Bid. Iptek 10. Bid. Keamanan dan ketertiban	1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan 2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik 3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat budaya pembangunan berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. 4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya 5. Meningkatkan pembangunan daerah.	1. Peningkatan Wasdat dan pembinaan di semua tingkatan pelayanan masyarakat. 2. Peningkatan kesejahteraan melalui Intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan. 3. Peningkatan seluruh lembaga ekonomi rakyat utamanya koperasi dan pengusaha kecil.	1. Meningkatkan profesionalisme, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah. 2. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik.	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah. 2. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik.	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui upaya profesionalisme, disiplin dan etos kerja. 2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan meningkatkan pengawasan melekat. 3. Mewujudkan pelayanan prima pada setiap tingkatan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan.	1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah. 2. Pembinaan kepegawaian. 3. Pembinaan mental beragama Islam. 1. Sosialisasi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 2. Peningkatan pengawasan melekat. 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana.	1. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah. 2. Pembinaan kepegawaian. 3. Pembinaan mental beragama Islam. 1. Sosialisasi Undang-undang nomor 22 tahun 1999 2. Peningkatan pengawasan melekat. 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana.	1. Diklat Aparatur. 1. Peningkatan disiplin pegawai. 1. Pembinaan mental beragama Islam. 1. Pemantapan otoda. 1. Peningkatan sistem pengawasan. 1. Penyuluhan. 1. Visualisasi tata cara pelayanan. 1. Peningkatan sarana dan prasarana.		

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	+	-
				4. Peningkatan SDM melalui program sukses Wajar Dikdas 9 tahun dan pelayanan pendidikan masyarakat. 5. Terciptanya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	2. Meningkatkan pengembangan SDA dengan memanfaatkan globalisasi informasi.	4. Derkembangnya potensi SDA.	1. Mengembangkan potensi SDA sektor pertanian dan kehutanan melalui penerapan hpiek.	1. Peningkatan pasca panen kedelai. 2. Pengembangan hutan rakyat. 3. Peningkatan modal kelompok tani. 4. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 3. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 4. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 5. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 6. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 7. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 8. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 9. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 10. Peningkatan kemampuan kelompok tani.	1. Penanaman cara panen. 2. Pengembangan teknologi pengolahan industri tahu dan tempe. 1. Penghijauan kebun rakyat 1. Penanaman ketahanan pangan (PKP) 2. Peningkatan pengembangan ketahanan pangan di pedesaan (PKPP) 3. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 4. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 5. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 6. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 7. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 8. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 9. Peningkatan kemampuan kelompok tani. 10. Peningkatan kemampuan kelompok tani.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								6. Normalisasi irigasi waduk prijetan 7. Rehabilitasi jalan inspeksi 8. Pembangunan perikanan dan peternakan rakyat terpadu.	1. Perbaikan bangunan 4 buah 1. Pengerasan dan pengaspalan jl. Kdp - waduk 1. Penerapan teknologi tepat guna. 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit. 3. Pengawasan Kesmayit	
								9. Pembangunan Sumber daya, sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.	1. Penataan Kantor Cabang Dinas di Kedungpring	
								10. Diversifikasi pangan dan Gizi	1. Sosialisasi penerapan MI/HACCP pada pengolahan tradisional dan menengah.	
								1. Pengembangan usaha perikanan dan peternakan.	1. Budidaya air tawar. 2. Budidaya sapi potong 3. Budidaya unggas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Meningkatkan peran institusi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima	5. Terwujudnya pelayanan prima pada setiap tingkatan.	1. Mewujudkan institusi pemerintah yang bersih dan baik dengan menantapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program	1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral. 2. Penguatan pelaksanaan tupoksi organisasi 2. Penataan personil sesuai dengan beban tugas	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program 1. Pembinaan pegawai 1. Penataan staf secara bertahap.	
						5. Meningkatnya kinerja pemerintah yang bersih dan baik.	1. Meningkatkan Pemerintahan Desa yang demokratis.	1. Peningkatan Pendidikan dan latihan operasional pemerintahan desa. 2. Pembinaan aparatur pemerintah desa dan BPD 3. Pemberdayaan LKD	1. Bklat aparat pemerintah desa dan BPD 1. Kompresi dinas aparat pemerintah desa dan pertemuan BPD secara rutin 1. Penyuluhan dan pembinaan secara terpadu.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4. Meningkatkan pembentukan opini dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.	7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memperhatikan aspirasi serta melibatkan peran masyarakat pada pembangunan.	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat. 2. Pembinaan tradisi dan nilai – nilai budaya. 6. Pengadaan sarana dan prasarana	1. Penyetaraan Guru melalui DII dan S L 7. Diklat Guru melalui gugus sekolah. 1. Pengiriman pertukaran pemuda antar propinsi (PPAP) 2. Pendataan organisasi pemuda dan club olah raga dan kesenian 3. Monitoring MOS 4. Pendataan anak putus sekolah 5. Pendataan kursus – kursus ketrampilan di luar sekolah. 1. Pendataan gedung dan mebelair sekolah. 2. Mengusulkan rehabilitasi gedung. 3. Penyaluran buku pelajaran. 4. Pengadaan alat peraga.	

TABEL 5

RENCANA STRATEGIK - 2

Instansi : Kecamatan Kedungpring

Tahun : 2005

FORMULIR PS - 2

NO	BIDANG / SEKTOR/ SUB SEKTOR	KEBIJAKSANAAN STRATEGIK NASIONAL	RENCANA STRATEGIK KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN 2005 (TAHUN KE 4 DARI V TAHUN)							KET
			VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN/ SASARAN			
							KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Bid. Hukum 2.Bid. ekonomi 3.Bid. Politik 4.Bid. Agama 5.Bid. Pendidikan 6.Bid. Sosbud 7.Bid. Pemb. daerah 8.Bid. SDA & Ling. Hidup 9. Bid. Iptek 10.Bid. Keamanan dan ketertiban	1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan 2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik 3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan taat memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. 4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya 5. Meningkatkan pembangunan daerah.	Dengan pelayanan prima, mewujudkan peningkatan perekonomian rakyat dan sumber daya manusia yang berkualitas.	1. Peningkatan Waskat dan pembinaan di semua tingkatan pelayanan masyarakat. 2. Peningkatan kesejahteraan melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan. 3. Pemberdayaan seluruh lembaga ekonomi rakyat utamanya koperasi dan pengusaha kecil.	1. Meningkatkan profesionalisme, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah.	1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah. 2. Tertiaksananya peraturan perundang – undangan . 3. Terwujudnya institusi pemerintah yang bersih dan baik.	1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui upaya peningkatan profesionalisme, disiplin dan etos kerja. 1. Pelaksanaan penerapan peraturan perundang – undangan dengan meningkatkan pengawasan melekat. 1. Mewujudkan pelayanan prima pada setiap tingkatan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan.	1. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah. 2. Pembinaan kepegawalan 3. Pembinaan mental beragama 1. Sosialisasi Undang – undang nomor 22 tahun 1999 2. Peningkatan pengawasan melekat. 1. Sosialisasi peraturan perundang – undang. 2. Penyederhanan prosedur pelayanan 3. Peningkatan sarana dan prasarana	1. Diklat Aparatur. 1. Peningkatan disiplin pegawai. 1. Pembinaan mental beragama Islam. 1. Pemantapan otoda. 1. Peningkatan sistem pengawasan 1. Penyuluhan 1. Visualisasi tata cara pelayanan 1. Pengadaan sarana dan prasarana.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Peningkatan SDM melalui program sukses Wajar Dikdas 9 tahun dan pelayanan pendidikan masyarakat. 5. Terciptanya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	2. Meningkatkan pengembangan SDA dengan memanfaatkan globalisasi informasi.	4. Berikembangnya potensial SDA.	1. Mengembangkan potensial SDA sektor pertanian dan kehutanan melalui penerapan iptek.	1. Penanganan pasca panen kedelai. 2. Pengembangan hutan rakyat. 3. Penguatan modal kelompok tani. 4. Peningkatan mutu intensifikasi.	1. Pemertanian cara panen. 2. Pengembangan teknologi pengolahan industri tahu dan tempe. 1. Penghijauan kebun rakyat. 1. Peningkatan ketahanan pangan (PKP) 3. Pembinaan pengembangan kementerian pangan di pedesaan (PKPF) 4. Pembinaan humberg pascetilik 1. Penguatan papak organik. 1. Pelatihan penyuluh 2. Penilaian angka kredit kelompok fungsional	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								6. Normalisasi jaringan irigasi waduk prijetan	1. Penggalian walet saluran sekunder 2. Pertbaikan pasangan	
								7. Rehabilitasi rumah dinas dan kantor	1. Perbaikan rumah dinas dan kantor	
								8. Pembangunan jaringan perikanan dan peternakan rakyat terpadu.	1. Penerapan teknologi tepat guna. 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit. 3. Pengawasan Kersmayit	
								9. Pembangunan Sumber daya, sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.	1. Penataan Kantor Cabang Dinas di Kedungpring	
								10. Diversifikasi pangan dan Gizi.	1. Sosialisasi penerapan MU/HACCP pada pengolahan tradisional dan menengah.	
								11. Pengembangan usaha perikanan dan peternakan.	1. Budidaya air tawar. 2. Budidaya sapi potong 3. Budidaya unggas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Meningkatkan peran institusi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima	5. Terwujudnya pelayanan prima pada setiap tingkatan.	1. Mewujudkan institusi pemerintah yang bersih dan baik dengan memantapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program	1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral. 2. Pemantapan pelaksanaan tupoksi organisasi 2. Penataan personil sesuai dengan beban tugas	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program 1. Pembinaan pegawai 1. Penataan staf secara bertahap.	
						5. Meningkatkan kinerja pemerintah yang bersih dan baik.	1. Meningkatkan Pemerintahan Desa yang demokratis.	1. Peningkatan Pendidikan dan latihan operasional pemerintahan desa. 2. Pembinaan aparatur pemerintah desa dan BPD 3. Pemberdayaan LKD	1. Diklat aparat pemerintah desa dan BPD 1. Kompreksi dinas aparat pemerintah desa dan pertemuan BPD secara rutin 1. Penyuluhan dan pembinaan secara terpadu.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4. Meningkatkan pembentukan opini dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.	7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi serta melibatkan peran masyarakat pada pembangunan.	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat. 3. Pembinaan tradisi dan nilai - nilai budaya.	1. Penyediaan Guru melalui DIH dan S L 7. Diklat Guru melalui gugus sekolah. 1. Peningkatan pertukaran pemudi antar propinsi (PPAP) 2. Pendataan organisasi pemuda dan club olah raga dan kesenian 3. Monitoring MOS 4. Pendataan anak putus sekolah 5. Pendataan kursus - kursus ketrampilan di luar sekolah. 6. Pengadaan sarana dan prasarana	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								4. Optimalisasi pelayanan UGD.	1. Membuka pelayanan UGD 24 jam.	
								5. Optimalisasi pelayanan KIA.	1. Membuka pelayanan rawat inap 24 jam	
								6. Optimalisasi pelayanan rawat inap.	1. Membuka pelayanan rawat inap 24 jam. 2. Misi lokakarya peningkatan kemampuan dan ketrampilan paramedis dan bidan.	
								7. Peningkatan keamanan, ketertarikan dan keterlibatan masyarakat.	1. Operasional Transfusi secara terpadu. 2. Penegakan peraturan daerah 3. Penertiban izin usaha 4. Penanggulangan bencana alam dan pengungsi	

TABEL 5

RENCANA STRATEGIK – 2

Instansi : Kecamatan Kedungpring

Tahun : 2006

FORMULIR PS – 2

NO	BIDANG / SEKTOR/ SUB SEKTOR	KEBIJAKSANAAN STRATEGIK NASIONAL	RENCANA STRATEGIK KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN 2006 (TAHUN KE 5 DARI V TAHUN)							KET
			VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN/ SASARAN			
							KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Bid. Hukum 2.Bid. ekonomi 3.Bid. Politik 4.Bid. Agama 5.Bid. Pendidikan 6.Bid. Sosbud 7.Bid. Pemb. daerah 8.Bid. SDA & Ling. Hidup. 9. Bid. Iptek 10.Bid. Keamanan dan ketertiban	1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan 2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik 3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. 4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya 5. Meningkatkan pembangunan daerah.	Dengan pelayanan prima, mewujudkan peningkatan perekonomian rakyat dan sumber daya manusia yang berkualitas.	1. Peningkatan Waskat dan pembinaan di semua tingkatan pelayanan masyarakat. 2. Peningkatan kesejahteraan melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan. 3. Pemberdayaan seluruh lembaga ekonomi rakyat utamanya koperasi dan pengusaha kecil.	1.Meningkatkan profesionalisme, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah.	1.Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah. 2. Terlaksananya peraturan perundang – undangan . 3. Terwujudnya indeks prestasi pemerintah yang bersih dan baik.	1.Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui upaya peningkatan profesionalisme, disiplin dan etos kerja. 1.Pelaksanaan penerapan peraturan perundang – undang dengan meningkatkan pengawasan melekat. 1. Mewujudkan pelayanan prima pada setiap tingkatan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan.	1. Pendidikan dan latihan aparatur pemerintah. 2. Pembinaan kepegawaian 3. Pembinaan mental beragama 1. Sosialisasi Undang – undang nomor 22 tahun 1999 2. Peningkatan pengawasan melekat. 1. Sosialisasi peraturan perundang – undang. 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan 3. Peningkatan sarana dan prasarana	1. Diklat Aparatur. 1. Peningkatan disiplin pegawai. 1. Pembinaan mental beragama Islam. 1. Pemantapan otoda. 1. Peningkatan sistem pengawasan 1. Penyuluhan. 1. Visualisasi tata cara pelayanan 1. Pengadaan sarana dan prasarana.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4. Peningkatan SDM melalui program sukses Wajar Diklat 9 tahun dan pelayanan pendidikan masyarakat. 5. Terciptanya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.	2.3 Meningkatkan pengetahuan SDA dengan memanfaatkan globalisasi Informatika.	4. Berkebangkitan potensi SDA.	1. Mengembangkan potensi SDA sektor pertanian dan kehutanan melalui penerapan iptek.	1. Peningkatan pascapaten kedel. 2. Pengembangan hutan rakyat. 3. Penguatan modal kelompok tani.	1. Penanaman cara panen. 2. Pengembangan teknologi pengolahan industri tahu dan tempe. 1. Penghijauan kebun rakyat. 1. Penanaman ketahanan pangan (PKP). 3. Pembinaan pengembangan kelembagaan pangan di pedesaan (PKPT). 4. Pembinaan humberg pacelitik. 1. Pengujian pupuk organik. 1. Pelatihan penyuluh. 2. Pelatihan anggota kredit kelompok fungsional.	
								4. Peningkatan mutu intensifikasi. 5. Pengembangan sumber daya manusia.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								6. Rehabilitasi jaringan irigasi waduk prijetan	1. Penggalian walet saluran sekunder 2. Perbaikan pasangan	
								7. Peningkatan SBA Pedesaan	1. Normalisasi embung/waduk desa.	
								8. Pembangunan perikanan dan peternakan rakyat terpadu.	1. Penerapan teknologi tepat guna. 2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit. 3. Pengawasan Kesmayit	
								9. Pembangunan Sumber daya, sarana dan prasarana perikanan dan peternakan.	1. Pemutaaan Kantor Cabang Dinas di Kedungpring	
								10. Diversifikasi pangan dan Gizi.	1. Sosialisasi penerapan MI/HACCP pada pengolahan tradisional dan menengah.	
								11. Pengembangan usaha perikanan dan peternakan.	1. Budidaya air tawar. 2. Budidaya sapi potong 3. Budidaya unggas	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Meningkatkan peran institusi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima	5. Terwujudnya pelayanan prima pada setiap tingkatan.	1. Mewujudkan institusi pemerintah yang bersih dan baik dengan memantapkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program	1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral. 2. Pemantapan pelaksanaan tupoksi organisasi 2. Penataan personil sesuai dengan beban tugas	1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program 1. Pembinaan pegawai 1. Penataan staf secara bertahap.	
						5. Meningkatnya kinerja pemerintah yang bersih dan baik.	1. Meningkatkan Pemerintahan Desa yang demokratis.	1. Peningkatan Pendidikan dan latihan operasional pemerintahan desa. 2. Pembinaan aparatur pemerintah desa dan BPD 3. Pemberdayaan LKD	1. Diklat aparat pemerintah desa dan BPD 1. Konsumsi dinas aparat pemerintah desa dan pertemuan BPD secara rutin 1. Penyuluhan dan pembinaan secara terpadu.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4. Meningkatkan pembentukan opini dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.	7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memperhatikan aspirasi serta melibatkan peran masyarakat pada pembangunan.	1. Peningkatan kualitas Pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat. 3. Pembinaan tradisi dan nilai - nilai budaya.	1. Penyetaraan Guru melalui DII dan S I. 7. Dilat Guru melalui gugus sekolah. 1. Pengiriman pertukaran pemuda antar provinsi (PPAP) 2. Pendataan organisasi pemuda dan club olah raga dan kesenian 3. Monitoring MOS 4. Pendataan anak putus sekolah 5. Pendataan kursus - kursus ketrampilan di luar sekolah. 6. Pengadaan sarana dan prasarana	1. Penyetaraan Guru melalui DII dan S I. 7. Dilat Guru melalui gugus sekolah. 1. Pengiriman pertukaran pemuda antar provinsi (PPAP) 2. Pendataan organisasi pemuda dan club olah raga dan kesenian 3. Monitoring MOS 4. Pendataan anak putus sekolah 5. Pendataan kursus - kursus ketrampilan di luar sekolah. 1. Pendataan gedung dan mebelair sekolah. 2. Mengusulkan rehabilitasi gedung. 4. Penyusunan buku pelajaran. 5. Pengadaan alat peraga.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								4.Optimalisasi pelayanan UGD.	1. Membuka pelayanan UGD 24 jam.	
								5.Optimalisasi pelayanan KIA.	1. Membuka pelayanan rawat Inap 24 jam	
								6. Optimalisasi pelayanan rawat inap.	1. Membuka pelayanan rawat inap 24 jam. 2. Mini lokakarya peningkatan kemampuan dan ketrampilan paramedis dan bidan.	
								7. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	1. Operasional Tramtib secara terpadu. 2. Penegakan peraturan daerah 3. Penertiban ljin usaha 4. Penanggulangan bencana alam dan pengungsi	

BAB VI

P E N U T U P

Perencanaan strategik Kecamatan Kedungpring adalah merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi untuk penyusunan dan penilaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan startegis ini dipergunakan sebagai pedoman rencana operasional oleh unit kerja kantor Kecamatan Kedungpring, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis, dan Lembaga – lembaga lainnya dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Kecamatan Kedungpring, sekaligus sebagai penjabaran sebagian kewenangan Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Camat (Vide : Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 tahun 2001) Adapun teknis penyusunannya berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Kedungpring, Januari 2003



Drs. R U S L A N, MM
Penata Tingkat I
NIP. 010073973